



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (L P P D)



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2019

SKPD PELAKSANA : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Urusan yang dilaksanakan :

Urusan Perhubungan

I. URUSAN PERHUBUNGAN

A. Jumlah Program Sebanyak 9 (sembilan) Program dan Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Kegiatan.

Rincian Program dan Kegiatan :

No.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
	URUSAN PERHUBUNGAN	623.350.000	9.075.480.460	264.200.000	3.402.281.500	13.365.311.960	616.300.000	8.863.201.717	263.081.000	3.362.490.350	13.105.073.067	98,05
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	247.400.000	593.227.460	14.700.000	90.455.500	945.782.960	247.150.000	563.010.353	14.650.000	90.455.500	915.265.853	96,77
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	110.400.000	-	-	116.400.000	6.000.000	98.691.041	-	-	104.691.041	89,94
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	163.400.000	4.500.000	-	-	167.900.000	163.150.000	4.500.000	-	-	167.650.000	99,85
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39.000.000	6.057.000	-	-	45.057.000	39.000.000	6.057.000	-	-	45.057.000	100,00
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	8.300.000	14.700.000	-	23.000.000	-	-	14.650.000	-	14.650.000	63,70
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	84.007.819	-	-	84.007.819	-	84.007.738	-	-	84.007.738	100,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	42.441.131	-	-	42.441.131	-	38.813.431	-	-	38.813.431	91,45
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	-	18.188.310	-	-	18.188.310	-	18.188.310	-	-	18.188.310	100,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	90.455.500	90.455.500	-	-	-	90.455.500	90.455.500	100,00
9	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	11.500.000	-	-	11.500.000	-	7.000.000	-	-	7.000.000	60,87
10	Penyediaan Makan dan Minuman	-	48.095.600	-	-	48.095.600	-	46.526.000	-	-	46.526.000	96,74
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	50.575.000	-	-	50.575.000	-	50.562.233	-	-	50.562.233	99,97
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	-	129.275.000	-	-	129.275.000	-	129.170.000	-	-	129.170.000	99,92
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	13.000.000	-	-	-	13.000.000	13.000.000	-	-	-	13.000.000	100,00
14	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	26.000.000	-	-	-	26.000.000	26.000.000	-	-	-	26.000.000	100,00
15	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	-	79.887.600	-	-	79.887.600	-	79.494.600	-	-	79.494.600	99,51
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.700.000	308.332.500	55.000.000	104.250.000	518.282.500	46.300.000	293.640.344	54.722.000	100.970.020	495.632.364	95,63
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	-	-	104.250.000	104.250.000	-	-	-	100.970.020	100.970.020	96,85
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.200.000	-	55.000.000	-	60.200.000	800.000	-	54.722.000	-	55.522.000	92,23
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45.500.000	308.332.500	-	-	353.832.500	45.500.000	293.640.344	-	-	339.140.344	95,85
III.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	21.850.000	961.819.700	-	-	983.669.700	21.450.000	901.279.330	-	-	922.729.330	93,80
1	Pembangunan fasilitas transportasi pedesaan (DAK)	1.450.000	955.950.000	-	-	957.400.000	1.050.000	895.409.630	-	-	896.459.630	93,63
2	Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (Penunjang DAK)	20.400.000	5.869.700	-	-	26.269.700	20.400.000	5.869.700	-	-	26.269.700	100,00
IV.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	7.000.000	5.216.000	38.500.000	-	50.716.000	6.400.000	5.155.000	37.709.000	-	49.264.000	97,14
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	7.000.000	4.466.000	38.500.000	-	49.966.000	6.400.000	4.405.000	37.709.000	-	48.514.000	97,09
2	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)	-	750.000	-	-	750.000	-	750.000	-	-	750.000	100,00
V.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	119.000.000	838.095.300	-	-	957.095.300	119.000.000	803.284.413	-	-	922.284.413	96,36
1	Penunjang Kegiatan WTN	5.000.000	29.770.000	-	-	34.770.000	5.000.000	25.040.000	-	-	30.040.000	86,40

2	Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	6.000.000	195.415.000	-	-	201.415.000	6.000.000	190.084.389	-	-	196.084.389	97,35
3	Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut	6.000.000	114.137.000	-	-	120.137.000	6.000.000	110.101.300	-	-	116.101.300	96,64

No.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGUNG									TINGKAT CAPAIAN (%)	
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL		TOTAL
4	Pembinaan dan Penertiban Transportasi Perhubungan Laut	-	62.214.000	-	-	62.214.000	-	61.472.862	-	-	61.472.862	98,81
5	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berjalan Lintas	5.000.000	37.461.000	-	-	42.461.000	5.000.000	37.123.412	-	-	42.123.412	99,20
6	Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa)	-	29.273.700	-	-	29.273.700	-	29.142.700	-	-	29.142.700	99,55
7	Operasional Pelayanan Transportasi Pendidikan	91.000.000	207.835.000	-	-	298.835.000	91.000.000	195.762.850	-	-	286.762.850	95,96
8	Pelayanan Terminal dan Perpikiran	6.000.000	161.989.600	-	-	167.989.600	6.000.000	154.556.900	-	-	160.556.900	95,58
VI.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	20.850.000	694.408.000	-	-	715.258.000	20.850.000	693.109.000	-	-	713.959.000	99,82
1	Pengembangan Pembangunan Pelabuhan	20.850.000	694.408.000	-	-	715.258.000	20.850.000	693.109.000	-	-	713.959.000	99,82
VII.	Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas	32.200.000	5.034.669.000	156.000.000	3.183.620.000	8.406.489.000	30.800.000	4.965.175.886	156.000.000	3.147.108.830	8.299.084.716	98,72
1	Pembangunan Penerangan jalan Umum	-	-	-	2.824.860.000	2.824.860.000	-	-	-	2.790.211.630	2.790.211.630	98,77
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum	20.600.000	5.034.669.000	156.000.000	-	5.211.269.000	20.600.000	4.965.175.886	156.000.000	-	5.141.775.886	98,67
3	Belanja Rambu-rambu RPPJ	1.000.000	-	-	72.710.600	73.710.600	1.000.000	-	-	72.180.100	73.180.100	99,28
4	Pengadaan dan Pemasangan Alat Keselamatan Lalu Lintas	10.600.000	-	-	286.049.400	296.649.400	9.200.000	-	-	284.717.100	293.917.100	99,08
VIII.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	124.350.000	185.190.000	-	23.956.000	333.496.000	124.350.000	184.888.641	-	23.956.000	333.194.641	99,91
1	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	124.350.000	185.190.000	-	23.956.000	333.496.000	124.350.000	184.888.641	-	23.956.000	333.194.641	99,91
IX.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	454.522.500	-	-	454.522.500	-	453.658.750	-	-	453.658.750	99,81
1	Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	-	454.522.500	-	-	454.522.500	-	453.658.750	-	-	453.658.750	99,81

B. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan:

- Masih Rendahnya SDM yang ada pada Dinas Perhubungan
- Masyarakat pengguna jalan belum sepenuhnya mematuhi peraturan tata tertib berlalu lintas di jalan raya dan kurang memperhatikan faktor keselamatan.
- Penyelenggaraan dan Pengawasan terhadap pemasangan dan pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas serta perlengkapan jalan lainnya masih belum optimal

2. Solusi:

- Melakukan Peningkatan SDM melalui Pendidikan, Pelatihan serta Bimbingan Teknis.
- Melakukan Sosialisasi tentang tertib lalu lintas dan tata cara berkendara yang baik
- Melakukan pengadaan dan pemasangan Rambu-Rambu di lokasi-lokasi rawan kecelakaan dan daerah rawan longsor

**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PER 31 DESEMBER 2017**

No.	Nama / NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural / Fungsional	SD/SLTP	SLTA	D.III	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
I Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika																		
1	Ir. NUZIRWAN. N, MT 19670826 199803 1 001	Kepala Dinas	Struktural					√	√					√		√		
2	HASRIAL AMRI, SSTP 19760402 199511 1 001	Sekretaris	Struktural				√		√					√			√	
3	PRIS DERIKA HABDI, SH 19750101 200701 1 015	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Struktural				√		√				√					√
4	ADMAI DEDI, ST 19650613 199703 1 001	Kepala Bidang Prasarana	Struktural					√	√				√					√
5	Drs. ABDUL HANIF 19620505 198603 1 020	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Struktural				√		√					√			√	
6	VERAWATI, S.Sos 19760605 200801 2 029	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Struktural				√			√			√					√
7	HILDA ZUSWARNI, SE 19750425 200902 2 003	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Struktural				√			√			√					√
8	ARLIM ARIF 19660621 199003 1 006	Kepala Seksi Lalu Lintas	Struktural		√				√				√					
9	EDDY RICARDO, SH 19690514 200604 1 003	Kepala Seksi Angkutan	Struktural				√		√				√					
10	FADLI AMRA, SH, MM 19761006 199403 1 001	Kepala Seksi Pengujian Sarana	Struktural					√	√				√					√
11	MARTALENA, SH 19640405 198908 2 001	Kepala Seksi Perencanaan Prasarana	Struktural				√			√			√					√
12	ISWARDI, SH, MM 19640401 198602 1 006	Kepala Seksi Pembangunan Prasarana	Struktural				√		√					√				√
13	M A R L I A N 19600516 198503 1 006	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	Struktural		√				√				√					√
14	YHOHANA RIZA, SH, M.Si 19650808 199303 2 006	Kasi Lalu Lintas Angkutan Laut	Struktural					√		√			√					√
15	DANOFRIN 19621107 198503 1 005	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan	Struktural		√				√				√					√
16	ERMAN JUSA, SH 19730301 199403 1 003	Kepala Seksi Keselamatan	Struktural				√		√				√					
17	A R N I 19601231 199010 2 002	Pengelola Gaji	Fungsional Umum		√					√			√					
18	JANUARDI, SE 19730126 200604 1 004	Surveyor Pemaduan Moda dan transportasi	Fungsional Umum				√		√				√					
19	ELZA NILAWATI, SE 19831227 200902 2 005	Pengelola Kepegawaian	Fungsional Umum				√			√			√					
20	NOFRIZON	Analisis Pengembangan Sarana dan	Struktural				√		√				√					

20	19711106 200701 1 002	Prasarana	Struktural				√		√			√					
21	MAHENDRA 19740525 200701 1 008	Pengelola Perpikiran	Struktural				√		√			√					
22	YENDRA RIVAI 19730307 200701 1 008	Pengelola Pengujian Kendaraan	Struktural				√		√			√					
23	ALEXANDER ADIGUNAWAN, A.Md 19780803 200604 1 003	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	Fungsional Umum			√			√			√					
24	AFRIOLDI PUTRA, A.Md 19820420 201101 1 006	Pengolah Data	Fungsional Umum			√			√			√					
25	SYAMSU AKMAL 19670329 200212 1 002	Pengelola Keselamatan & Keamanan Pelayanan Sungai, Danau & Penyeberangan	Fungsional Umum		√				√			√					
26	SYAFRUDDIN 19600713 200604 1 003	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Fungsional Umum		√				√			√					
27	I M R A N 19671105 200604 1 003	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	Fungsional Umum		√				√			√					
28	A I D A L 19690901 200604 1 004	Pengadministrasi Keuangan	Fungsional Umum		√				√			√					
29	MARJONI CANDRA 19751124 200604 1 008	Pengolah Data	Fungsional Umum		√				√			√					
30	JOHN HENDRA 19700722 200701 1 007	Pengelola Sarana Angkuta	Fungsional Umum		√				√			√					
31	NOVENDRIADI 19721027 200701 1 003	Pengolah Data	Fungsional Umum		√				√			√					
32	SUDRIANTO 19730709 200701 1 004	Bendahara	Fungsional Umum		√				√			√					
33	WENDRI KARTIN 19730416 200701 1 006	Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan	Fungsional Umum		√				√			√					
34	JAMRA SURYA 19740705 200701 1 012	Penelaah Dampak Lingkungan	Fungsional Umum		√				√			√					
35	DONI HENDRI 19760606 200701 1 011	Pengolah Data	Fungsional Umum														
36	DELVI DORIS 19780618 200701 1 007	Pengolah Data	Fungsional Umum		√				√			√					
37	AFFANDI 19780928 200701 1 005	Bendahara	Fungsional Umum		√				√			√					
38	RENO EFFENDI 19801115 200701 1 003	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Fungsional Umum		√				√			√					
39	ADE PUTRA 19840417 200701 1 002	Pengadministrasi LLAJ	Fungsional Umum		√				√			√					
40	SUKO MUCHTARUM SURI 19801007 200701 1 003	Pengelola Pengujian Kendaraan	Struktural		√				√			√					
41	DEDI HARISANDU 19850131 200801 1 003	Pengelola Pengujian Kendaraan	Struktural		√				√			√					
42	NOVAN ANDREW 19841122 201001 1 005	Pengadministrasi Umum	Fungsional Umum		√				√			√					
43	YUDI HERMANTO 19840711 201001 1 012	Pengadministrasi Keuangan	Fungsional Umum		√				√			√					
44	RAMA BERNANDO 19861029 201001 1 002	Pengelola Pengujian Kendaraan	Struktural		√				√			√					

**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PER 31 DESEMBER 2019**

No.	Nama / NIP	Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/ SLTP	SLTA	D.III	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
I	Dinas Perhubungan															
1	GUNAWAN, S.Sos, M.Si 19700204 199101 1 002					√	√					√		√		
2	TAMRIN, S.Sos, MM 19650611 199003 1 005					√	√					√			√	
3	DEDY MIRZA YULIANTO, ST, MT 19750101 200701 1 015					√	√					√				√
4	MARZAN, SH, MM 19700316 198903 1 001					√	√				√					√
5	FADLI AMRA, SH, MM 19761006 199403 1 001					√	√				√					√
6	VERAWATI, S.Sos 19760605 200801 2 029				√			√			√					√
7	ELZA NILAWATI, SE 19831227 200902 2 005				√			√			√					
8	ARLIM ARIF 19660621 199003 1 006		√				√				√					
9	EDDY RICARDO, SH 19690514 200604 1 003				√		√				√					√
10	YUHERMAN, SH 19670316 198803 1 003				√		√				√					√
11	MARTALENA, SH 19640405 198908 2 001				√			√			√					√
12	HERRY SUSILO, ST 19640401 198602 1 006				√		√				√					√
13	AGUSTAR, SP 19630925 198711 1 001				√		√				√					√

No.	Nama / NIP	Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/ SLTP	SLTA	D.III	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
14	YHOHANA RIZA, SH, M.Si 19650808 199303 2 006					√		√				√				√
15	DANOFRIN 19621107 198503 1 005		√				√				√					√
16	ERMAN JUSA, SH 19730301 199403 1 003				√		√				√					√
17	HASRIAL AMRI, SSTP 19760402 199511 1 001				√		√				√				√	
18	DASRIL, SH 19681207 200212 1 003				√		√				√					
19	JANUARDI, SE 19730126 200604 1 004				√		√				√					
20	NOFRIZON, S.Sos 19711106 200701 1 002				√		√				√					
21	MAHENDRA, S.Ip 19740525 200701 1 008				√		√				√					
22	YENDRA RIVAI, ST 19730307 200701 1 008				√		√				√					
23	DEDI HARISANDU, SE 19850131 200801 1 003				√		√				√					
24	ALEXANDER ADIGUNAWAN, A.Md 19780803 200604 1 003			√			√				√					
25	AFFANDI, S.Sos 19780928 200701 1 005				√		√				√					
26	RENO EFFENDI, S.Sos 19801115 200701 1 003				√		√				√					
27	SUKO MUCHTARUM SURI, SE 19801007 200701 1 003				√		√				√					
28	SYAMSU AKMAL 19670329 200212 1 002		√				√				√					

No.	Nama / NIP	Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)				
		SD/ SLTP	SLTA	D.III	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
29	JULIADI AZMY, S.Ip 19790722 200502 1 004				√		√				√						
30	I M R A N 19671105 200604 1 003		√				√			√							
31	A I D A L 19690901 200604 1 004		√				√			√							
32	MARJONI CANDRA 19751124 200604 1 008		√				√			√							
33	JOHN HENDRA 19700722 200701 1 007		√				√			√							
34	NOVENDRIADI 19721027 200701 1 003		√				√			√							
35	SUDRIANTO 19730709 200701 1 004		√				√			√							
36	WENDRI KARTIN 19730416 200701 1 006		√				√			√							
37	JAMRA SURYA 19740705 200701 1 012		√				√			√							
38	DONI HENDRI 19760606 200701 1 011		√				√			√							
39	DELVI DORIS 19780618 200701 1 007		√				√			√							
40	ADE PUTRA 19840417 200701 1 002		√				√			√							
41	NOVAN ANDREW 19841122 201001 1 005		√				√			√							
42	RAMA BERNANDO 19861029 201001 1 002		√				√			√							
43	RONI MARTAGUSRIANTO 19820303 200701 1 001		√				√			√							

No.	Nama / NIP	Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/ SLTP	SLTA	D.III	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
44	YUSRIZAL 19691007 201212 1 003		√				√			√						
45	ETIKA TAMZIL 19761105 201212 1 004		√				√			√						
TOTAL			19	1	19	6	42	3		16	24	5		1	1	10

Painan, 15 Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos, M.Si

196119700104 199101 1 002

Lampiran III.1
TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

(1)	ASPEK (2)	FOKUS -3	NO (4)	IKK (5)	RUMUS (6)	JENIS DATA (7)	CAPAIAN KINERJA (8)	KETERANGAN (9)
2	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Hubungan Antar Daerah	12	Kerjasama dengan daerah lain atau pihak lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2019	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak 0 MOU	Tidak Ada MOU	
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	41	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda tahun 2019	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun 2019	Penghargaan yang diterima, sebanyak 1 Penghargaan yang terdiri dari : 1. Sertifikat Perhargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	1 Penghargaan	

Painan, 15 Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos, M.Si

NIP. 197004011991011002

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : PESISIR SELATAN
 NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PERHUBUNGAN

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran Serta Realisasinya	Urusan Perhubungan 6 Program (Anggaran Sebesar Rp. 11.401.724.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.240.516.100,-)	1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5. Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas 6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
						Urusan Keuangan 1 Program (Anggaran Sebesar Rp.454.522.500,- dan realisasi sebesar Rp.453.658.750,-)	Urusan Keuangan terdiri dari Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 7 yang terdiri dari: 1. SOP tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. SOP tentang Peminjaman dan Pengembalian Rambu-rambu Portabel 3. SOP tentang Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Barang 4. SOP tentang Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Perdesaan 5. SOP tentang Parkir 6. SOP tentang Peminjaman Bus 7. SOP tentang Pengaduan	7 (tujuh) SOP	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada Atau Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	100%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 45 personel - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6.801 personil	0,66%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 orang - Pejabat yang ada, sebanyak 16 orang	69%	

			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 16 jabatan	100%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada Dokumen yang dimaksud, sebanyak 4 Jenis, yang terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	4 Jenis Dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah , sebanyak 12 Program - Jumlah Program dalam RENJA yang ditetapkan sebanyak 12 Program	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	75%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 17.546.987.285,-	0,95%	

						- Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.846.923.981.831,39,-		
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 17.080.180.792,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 1.860.991.871.831,39,-	1,01%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah X 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.105.073.067,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 17.080.180.792,-	76,73%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat Daerah X 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.975.107.725,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 17.080.180.792,-	23,27%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Lra, Calk)	Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. Laporan Ekuitas 5. Laporan Fungsional	Ada sebanyak 5 (lima) jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Daftar Inventaris Barang Milik Daerah	Ada sebanyak 1 (satu) Dokumen	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebanyak 0 dengan nilai Rp. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 26.108.793.527,-	0%	

8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/ prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman di Mass Media	3 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Ada	

Prianan, 15 Januari 2020
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PESIR SELATAN

GUNAWAN, S.Sos, M.Si
 NIP. 19700704 199101 1 002

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

KABUPATEN : PESISIR SELATAN
 NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PERHUBUNGAN

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran Serta Realisasinya	6 Program (Anggaran Sebesar Rp. 11.401.724.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.240.516.100,-	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 7 yang terdiri dari: 1. SOP tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. SOP tentang Peminjaman dan Pengembalian Rambu-rambu Portabel 3. SOP tentang Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Barang 4. SOP tentang Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Perdesaan 5. SOP tentang Parkir 6. SOP tentang Peminjaman Bus 7. SOP tentang Pengaduan	7 (tujuh) SOP	
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada Atau Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	100%	
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	Tidak ada	

4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 45 personel - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6.789 personil	0,66%		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 orang - Pejabat yang ada, sebanyak 16 orang	69%		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 16 jabatan	100%		
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki perangkat daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Ada Dokumen yang dimaksud, sebanyak 4 Jenis, yang terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	4 Jenis Dokumen		
			10	Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah , sebanyak 12 Program - Jumlah Program dalam RENJA yang ditetapkan sebanyak 12 Program	100%	
			11	Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	75%	

		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 17.546.987.285,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.860.991.871.831,39,-	0,94%	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 17.080.180.792,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 1.860.991.871.831,39,-	0,92%	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah X 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.105.073.067,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 17.080.180.792,-	76,73%	
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja Perangkat Daerah X 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.975.107.725,- - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 17.080.180.792,-	23,27%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Lra, Calk)	Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK 4. Laporan Ekuitas 5. Laporan Fungsional	Ada sebanyak 5 (lima) jenis	

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. Daftar Inventaris Barang Milik Daerah	Ada sebanyak 1 (satu) Dokumen	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebanyak 0 dengan nilai Rp. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 26.108.793.527,-	0%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/ prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman di Mass Media	3 Jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	Ada	

Painan, 15 Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos, M.Si

SP. 197/00204 199101 1 002

Lampiran III.3
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	URUSAN	NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
15	PERHUBUNGAN	102	Rasio Konektivitas Kabupaten	<p>Rasio konektivitas Kabupaten = $(IK \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$</p> <ul style="list-style-type: none"> o IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten} \times \text{bobot trayek}) / \text{dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut}$ o IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = $\text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten tersebut} \times \text{bobot lintas} / \text{dibagi (jumlah kebutuhan)}$ <p>Keterangan :</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</p> <p>Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)</p>		

			<p>Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>a. Bobot trayek atau lintas dengan frekwensi tinggi (>5 x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot trayek atau lintas dengan frekwensi sedang (3-4 x dalam seminggu), bobot = 0,8</p> <p>c. Bobot trayek atau lintas dengan frekwensi rendah (<3 x dalam seminggu), bobot = 0,5</p>		
		103	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	0,246

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAINAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
16	Perhubungan	56	Angkutan Darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan Darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100$	$\frac{2.479}{790.793} \times 100 = 0,31$	

Painan, 15 Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



GUNAWAN, S.Sos, M.Si

NIP. 19700204 199101 1 002